

**TEORI GLOBALISASI: PERAN ELITE PENDIDIKAN DALAM TRANSFORMASI
KEBIJAKAN SOSIAL KEAGAMAAN**

Muh.Khusnul Himam¹ Muhammad Taufiqur Rohman² Mohammad Rofiq³

¹²³Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

himam3070@gmail.com¹ muhammadtaufiqurrohman280200@gmail.com²

berhasilrofiq1@gmail.com³

Abstrak

Globalisasi menuntut standarisasi nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, toleransi, dan modernitas di berbagai negara, yang sering kali memicu ketegangan dengan identitas tradisional keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengaruh elite pendidikan dalam menjembatani kepentingan global tersebut dengan kebijakan sosial-keagamaan di tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mengkaji bagaimana kaum intelektual bertindak sebagai agen "penyaring" dan "penerjemah" nilai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa elite pendidikan menggunakan modal simbolik dan otoritas akademik mereka untuk melakukan kontekstualisasi nilai global ke dalam bahasa kebijakan yang selaras dengan doktrin keagamaan. Proses "glokalisasi" kebijakan ini terbukti krusial dalam menjaga stabilitas negara di tengah tekanan organisasi internasional. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan berupa resistensi dari kelompok akar rumput yang memandang proses tersebut sebagai agenda elite semata. Penelitian ini merekomendasikan perlunya inklusivitas yang lebih luas dalam diseminasi kebijakan untuk memperkecil celah diskursus antara elite dan masyarakat.

Kata Kunci : Elite Pendidikan, Globalisasi, Kebijakan Sosial-Keagamaan, Moderasi, Stabilitas Negara.

Abstract

Globalization demands the standardization of universal values such as human rights, tolerance, and modernity across nations, which often triggers tension with traditional religious identities. This research aims to analyze the mechanisms through which educational elites influence and bridge these global interests with local socio-religious policies. Employing a qualitative approach and critical discourse analysis, this study examines how intellectuals act as "filtering" and "translating" agents of values. The findings indicate that educational elites utilize their symbolic capital and academic authority to contextualize global values into policy language aligned with religious doctrines. This process of policy "glocalization" proves crucial in maintaining state stability amidst pressure from international organizations. However, the study also notes challenges in the form of resistance from grassroots groups who perceive the process as a purely elite agenda. This research

recommends the need for broader inclusivity in policy dissemination to narrow the discursive gap between the elite and the general public.

Keywords : Educational Elites, Globalization, Socio-Religious Policy, Moderation, State Stability.

PENDAHULUAN

Arus globalisasi pada abad ke-21 tidak sekadar membawa integrasi ekonomi, tetapi juga memaksakan sebuah "rezim nilai" yang menuntut standarisasi norma sosiokultural di seluruh dunia. Fenomena ini mewajibkan negara-bangsa untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia (HAM), toleransi pluralisme, dan semangat modernitas sebagai prasyarat menjadi bagian dari komunitas global yang beradab.¹ Standarisasi ini sering kali bersifat top-down, di mana nilai-nilai yang lahir dari rahim liberalisme Barat diposisikan sebagai ukuran absolut bagi kemajuan sebuah bangsa, yang pada gilirannya memaksa struktur domestik untuk melakukan penyesuaian regulasi secara masif.

Namun, proses universalisasi nilai ini tidak berjalan tanpa hambatan. Di banyak negara dengan basis religius yang kuat, muncul ketegangan dialektis antara doktrin tradisional keagamaan dengan tuntutan modernitas global yang sering dianggap sekuler.² Benturan ini menciptakan paradoks; di satu sisi negara ingin mempertahankan legitimasi internasional, namun di sisi lain harus menghadapi resistensi lokal yang memandang standar global sebagai ancaman terhadap identitas moral dan kedaulatan nilai keagamaan. Tanpa adanya mediasi yang tepat, ketegangan ini berpotensi memicu polarisasi sosial yang ekstrem dan mengganggu stabilitas nasional.

Artikel ini berargumen bahwa elite pendidikan atau kelompok intelektual memegang peran sentral sebagai aktor hibrida yang menjembatani jurang pemisah tersebut. Elite pendidikan tidak sekadar menjadi penyalur nilai-nilai global, melainkan bertindak sebagai agen "penyaring" (filter) dan "penerjemah" (translator) yang melakukan kontekstualisasi nilai global ke dalam bahasa kebijakan lokal.³ Melalui proses intelektualisasi ini, nilai-nilai seperti HAM dan toleransi direformulasi agar selaras dengan napas keagamaan lokal, sehingga kebijakan sosial-keagamaan yang dihasilkan tetap memiliki daya laku secara internasional tanpa kehilangan legitimasi di mata

¹ Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah: Dari Indonesia untuk Dunia* (Jakarta: Kompas, 2020), 45.

² Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitra, 2017), 112.

³ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Jakarta: Paramadina, 2019), 89.

masyarakat tradisional. Peran ini menjadi kunci utama bagi negara dalam menjaga stabilitas politik di tengah pusaran arus globalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme bagaimana pengaruh intelektual elite pendidikan bekerja dalam memengaruhi produk kebijakan sosial keagamaan. Dengan membedah proses negosiasi nilai tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai pentingnya kepemimpinan intelektual dalam memitigasi konflik antara norma global dan tradisi lokal.

KAJIAN TEORI

1. Globalisasi dan Dialektika Glocalization

Dalam membedah fenomena standarisasi nilai global, penelitian ini menggunakan lensa World Culture Theory yang dikembangkan oleh John Meyer. Teori ini berpendapat bahwa terdapat model budaya dunia yang terstandarisasi sering disebut sebagai "peta dunia Barat" yang menyebarkan gagasan tentang hak asasi manusia, sains, dan rasionalitas sebagai norma universal yang harus diadopsi oleh setiap negara untuk mendapatkan legitimasi internasional.⁴ Namun, untuk memahami bagaimana nilai ini diterima di tingkat lokal, perspektif Glocalization dari Roland Robertson menjadi krusial.

Robertson berpendapat bahwa globalisasi tidak serta merta menghapuskan identitas lokal (homogenisasi), melainkan terjadi pertemuan antara "yang universal" dan "yang partikular".⁵ Dalam konteks ini, nilai-nilai global mengalami negosiasi dan adaptasi agar sesuai dengan kondisi sosiologis setempat. Proses ini menjelaskan mengapa kebijakan sosial keagamaan di satu negara dapat terlihat "modern" secara universal namun tetap memiliki "karakter" tradisional yang kuat.

2. Hubungan Agama dan Negara dalam Pembentukan Kebijakan

Pembentukan kebijakan sosial keagamaan tidak pernah terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam tarikan kepentingan antara otoritas politik dan otoritas moral keagamaan. M.

⁴ John W. Meyer, *World Society and the Nation-State* (Stanford: Stanford University Press, diterjemahkan oleh Gramedia, 2018), 72.

⁵ Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture* (London: Sage, diterjemahkan oleh Pustaka Pelajar, 2014), 103.

Syafi'i Anwar menjelaskan bahwa hubungan agama dan negara dapat dikategorikan ke dalam pola integratif, simbiotik, atau dialektik.⁶ Di banyak negara berpenduduk mayoritas beragama, negara sering kali menggunakan agama sebagai instrumen legitimasi kebijakan, sementara aktor agama menggunakan instrumen negara untuk memformalkan norma-norma keyakinan mereka.

Kebijakan sosial keagamaan, seperti regulasi pendidikan agama atau aturan toleransi, merupakan produk dari "ruang publik deliberatif" di mana para intelektual berperan sebagai penyambung lidah antara aspirasi masyarakat religius dan tuntutan birokrasi negara.⁷ Elite pendidikan yang memiliki akses terhadap literatur global sekaligus pemahaman mendalam terhadap teks keagamaan klasik bertindak sebagai perancang naskah akademik yang menjembatani kedua kepentingan tersebut.

3. Peran Elite Pendidikan sebagai Agen Hibrida

Secara teoretis, elite pendidikan dipandang sebagai pemegang modal simbolik (merujuk pada Pierre Bourdieu) yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai "modernitas yang islami" atau "tradisi yang progresif".⁸ Mereka berfungsi sebagai filter yang memilah mana dari nilai global yang dapat diintegrasikan tanpa memicu gejolak, dan mana dari tradisi lokal yang perlu direinterpretasi agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, kebijakan yang lahir bukanlah hasil penaklukan nilai global atas lokal, melainkan hasil sintesis intelektual yang sengaja dirancang untuk menjaga stabilitas negara.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena peran elite intelektual secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman holistik mengenai proses subjektif, negosiasi makna, dan

⁶ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 56.

⁷ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Kencana, 2012), 215.

⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 2017), 134

konteks sosial di balik lahirnya sebuah kebijakan sosial keagamaan.⁹ Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini tidak hanya melihat hasil akhir kebijakan, tetapi juga melacak proses dialektika antara nilai global dan nilai lokal yang terjadi di ruang-ruang akademik dan birokrasi.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data utama:

- a. Data Sekunder (Dokumen Resmi): Meliputi naskah akademik kebijakan sosial keagamaan, dokumen kurikulum pendidikan nasional, serta teks pidato pejabat publik yang merepresentasikan sikap negara terhadap isu HAM dan toleransi.
- b. Data Primer (Diskursus Intelektual): Mencakup karya tulis, esai, dan pemikiran para tokoh kunci dari kalangan elite pendidikan yang terlibat dalam perumusan kebijakan atau yang menjadi rujukan intelektual bagi para pembuat kebijakan.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi teks. Peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap literatur nasional dan dokumen kebijakan yang relevan untuk memetakan bagaimana istilah-istilah global (seperti human rights atau modernity) diserap dan didefinisikan ulang dalam konteks keindonesiaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Teknik ini digunakan untuk melampaui makna tekstual dan mengungkap bagaimana kekuasaan serta ideologi bekerja di balik pilihan kata dalam kebijakan publik.¹¹ Peneliti akan membedah bagaimana elite pendidikan menggunakan wacana untuk melakukan "penerjemahan" nilai global sehingga terlihat selaras dengan doktrin keagamaan. Selain itu, analisis isi (content analysis) digunakan secara komplementer untuk mengidentifikasi frekuensi dan konsistensi kemunculan narasi modernitas dalam dokumen-dokumen kebijakan yang dikaji.

⁹ Burhan Bungin, *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 82.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 213.

¹¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 145

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Elite Pendidikan: Arsitek Kebijakan Hibrida

Elite pendidikan yang berperan sebagai agen penyaring ini bukanlah kelompok homogen, melainkan kumpulan intelektual yang memiliki modal simbolik ganda. Profil mereka umumnya mencakup akademisi senior dari universitas ternama, lulusan perguruan tinggi luar negeri (sering kali dari Barat), namun tetap memiliki ketersambungan kuat dengan institusi keagamaan tradisional.¹² Kualifikasi ganda ini memungkinkan mereka memahami tata bahasa global seperti diskursus demokrasi dan hak asasi sekaligus fasih dalam menafsirkan teks-teks klasik keagamaan. Keberadaan mereka sebagai "intelektual birokrat" atau konsultan kebijakan memberikan legitimasi ilmiah bagi setiap produk hukum yang dihasilkan pemerintah.

2. Mekanisme Pengaruh terhadap Kebijakan

Proses pengaruh intelektual ini bekerja melalui beberapa saluran strategis yang sistematis:

- a. **Pendudukan Jabatan Strategis:** Elite pendidikan ini sering kali ditempatkan sebagai staf ahli, kepala badan penelitian, atau dewan pertimbangan di kementerian kunci (seperti Kementerian Agama atau Kemendikbudristek). Hal ini memungkinkan mereka mengintervensi proses formulasi kebijakan sejak tahap awal.¹³
- b. **Produksi Naskah Akademik:** Kebijakan tidak lagi dilahirkan dari perintah politik semata, melainkan melalui riset empiris. Elite ini menyusun naskah akademik yang membingkai tuntutan global (seperti kesetaraan gender) ke dalam pembenaran sosiologis dan teologis yang dapat diterima publik.
- c. **Politik Bahasa (Diksi Global):** Terdapat penggunaan diksi strategis untuk memperhalus masuknya nilai-nilai modern. Istilah global seperti human rights atau liberalism sering kali diganti dengan diksi yang lebih "ramah" secara lokal seperti "Moderasi", "Inklusivitas", atau "Kemaslahatan Umum" (Masalah Mursalah).¹⁴ Penggunaan diksi ini berfungsi untuk mengurangi gesekan sosiologis di masyarakat.

¹² Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Kencana, 2012), 342.

¹³ Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah: Dari Indonesia untuk Dunia* (Jakarta: Kompas, 2020), 87.

¹⁴ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 102.

3. Studi Kasus: Transformasi Kebijakan Moderasi Beragama

Salah satu bukti nyata dari peran elite pendidikan ini adalah lahirnya kebijakan Moderasi Beragama dalam kurikulum pendidikan dan tata kelola kehidupan beragama. Dalam kebijakan ini, nilai-nilai global mengenai toleransi dan resiliensi sosial diterjemahkan ke dalam konsep keagamaan yang mapan (seperti Wasathiyah).

Contoh Kasus: Perubahan kurikulum madrasah yang mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan global (global citizenship) tanpa menghilangkan muatan syariat. Elite pendidikan bertindak sebagai "penerjemah" yang memastikan bahwa menjadi warga dunia yang toleran adalah bagian dari perintah agama, bukan sekadar mengikuti kemauan Barat.¹⁵

4. Resistensi dan Tantangan di Tingkat Akar Rumput

Meskipun elite pendidikan berhasil memformulasikan kebijakan yang terlihat harmonis, resistensi tetap muncul dari kelompok akar rumput yang melihat proses ini sebagai "sekularisasi terselubung". Kelompok konservatif sering kali menuduh elite ini terlalu berkompromi dengan standar Barat dan mengabaikan kemurnian ajaran tradisional.¹⁶ Ketegangan ini menunjukkan bahwa proses "penerjemahan" nilai tidak selalu berjalan linier dan sering kali menciptakan jarak komunikasi antara elite intelektual di pusat kekuasaan dengan masyarakat awam yang memiliki literasi global terbatas. Tantangan utama yang dihadapi negara adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas sebagai formalitas diplomatik, melainkan benar-benar terinternalisasi tanpa menimbulkan gejolak sosial.

5. Analisis: Globalisasi Dalam Kebijakan Lokal

a. Tekanan Internasional dan Kebutuhan Domestik

Dalam membedah asal-usul kebijakan sosial-keagamaan di era kontemporer, sulit untuk mengabaikan pengaruh organisasi supranasional seperti PBB, UNESCO, hingga lembaga donor internasional. Pertanyaannya adalah: apakah kebijakan seperti moderasi beragama atau kesetaraan gender dalam kurikulum merupakan kebutuhan sosiologis murni, atau sekadar respons terhadap tekanan eksternal?

¹⁵Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 2017), 156.

¹⁶Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitra, 2017), 201.

Secara kritis, kebijakan lokal sering kali merupakan bentuk "akomodasi strategis" terhadap World Culture Theory. Organisasi internasional sering kali menjadikan penghormatan terhadap HAM dan toleransi sebagai parameter good governance yang memengaruhi indeks investasi dan bantuan luar negeri.¹⁷ Namun, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut tidak diadopsi secara mentah. Elite pendidikan melakukan apa yang disebut sebagai penerjemahan pragmatis; mereka mengambil substansi nilai global yang universal untuk mengamankan posisi negara dalam pergaulan internasional, namun membungkusnya dengan justifikasi yang berakar pada kearifan lokal untuk menghindari tuduhan "tunduk pada asing".

b. Sinkretisme Identitas: Menyeimbangkan Agama dan Modernitas

Tantangan terbesar bagi elite intelektual adalah menjaga agar identitas keagamaan asli tidak tergerus oleh tuntutan modernitas yang sering kali bersifat sekuler. Analisis terhadap berbagai produk kebijakan menunjukkan adanya upaya sinkretisme identitas yang sistematis.

Elite pendidikan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks keagamaan.¹⁸ Sebagai contoh, nilai "demokrasi" tidak diperkenalkan sebagai produk Barat, melainkan dikontekstualisasikan melalui konsep Syura (musyawarah) dalam Islam. Begitu pula dengan "toleransi" yang dibingkai melalui piagam-piagam historis keagamaan lokal. Dengan cara ini, modernitas tidak lagi dipandang sebagai ancaman eksternal, melainkan sebagai penemuan kembali (reinventing) nilai-nilai luhur agama yang sempat terpendam.

c. Elite sebagai Penjaga Stabilitas (Stabilizer)

Peran elite pendidikan dalam menyeimbangkan dua kutub ini pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen stabilitas negara. Jika negara langsung mengadopsi nilai global tanpa proses penyaringan intelektual, maka gejolak sosial dari kelompok konservatif akan sulit diredam.¹⁹ Sebaliknya, jika negara menutup diri dari nilai global, maka isolasi internasional akan mengancam pertumbuhan ekonomi.

Elite intelektual, dengan otoritas akademiknya, menciptakan "zona nyaman" di mana masyarakat merasa identitas agamanya tetap terjaga, sementara di saat yang sama, negara tetap

¹⁷ John W. Meyer, *World Society and the Nation-State* (Stanford: Stanford University Press, diterjemahkan oleh Gramedia, 2018), 105.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Jakarta: Paramadina, 2019), 112.

¹⁹ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Kencana, 2012), 415.

terlihat modern dan progresif di mata dunia. Inilah yang menjadi alasan mengapa kebijakan sosial-keagamaan di Indonesia sering kali terlihat unik berada di persimpangan antara konservatisme yang terjaga dan liberalisme yang terkendali.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah arus globalisasi yang menuntut standarisasi nilai universal, negara tidak bertindak sebagai penerima pasif. Elite pendidikan muncul sebagai aktor kunci yang menjalankan fungsi hibrida sebagai "penyaring" dan "penerjemah" nilai. Mereka berhasil melakukan dekonstruksi terhadap narasi global (seperti HAM, toleransi, dan modernitas) dan merajutnya kembali ke dalam bahasa lokal yang bermuatan religius. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan sosial-keagamaan di tingkat domestik merupakan produk dialektika antara tekanan struktur global (World Culture) dan kebutuhan akan legitimasi tradisional. Elite intelektual, dengan modal simbolik dan otoritas akademiknya, telah memastikan bahwa proses modernisasi tetap berjalan tanpa harus memicu disintegrasi sosial akibat benturan nilai.

Secara praktis, peran elite intelektual sebagai jembatan kebijakan memiliki implikasi yang signifikan. Agar produk kebijakan tidak sekadar dianggap sebagai "proyek elite" atau agenda tersembunyi organisasi internasional, pemerintah perlu memastikan adanya inklusivitas dalam proses perumusan. Kebijakan yang hanya melibatkan elite pendidikan di tingkat pusat berisiko menciptakan jarak diskursif dengan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan diseminasi yang lebih luas dan pelibatan tokoh agama di tingkat lokal agar proses "penerjemahan" nilai ini dapat terinternalisasi secara organik hingga ke level sosiologis paling bawah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus analisis yang lebih banyak menitikberatkan pada dokumen kebijakan dan diskursus elite di tingkat makro. Dinamika penerimaan atau penolakan masyarakat secara empiris di tingkat mikro belum tereksplorasi secara mendalam. Untuk riset mendatang, disarankan adanya penelitian lapangan (fieldwork) yang mengkaji efektivitas implementasi kebijakan tersebut di komunitas-komunitas keagamaan yang spesifik. Selain itu, perbandingan antar-negara (studi komparatif) mengenai bagaimana elite pendidikan di negara dengan latar belakang budaya berbeda merespons tekanan global yang sama akan menjadi kontribusi berharga bagi studi hubungan internasional dan sosiologi agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, Azyumardi. 2020. *Relevansi Islam Wasathiyah: Dari Indonesia untuk Dunia*. Jakarta: Kompas.
- Bungin, Burhan. 2020. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods*. Jakarta: Prenada Media.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Latif, Yudi. 2012. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Jakarta: Kencana.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Madjid, Nurcholish. 2019. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Meyer, John W. 2018. *World Society and the Nation-State*. Diterjemahkan oleh Gramedia. Stanford: Stanford University Press.
- Misrawi, Zuhairi. 2017. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitra.
- Robertson, Roland. 2014. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Diterjemahkan oleh Pustaka Pelajar. London: Sage.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.